

## **Penerapan *Social Entrepreneurship* dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Perkotaan**

**ZAILI RUSLI, CHALID SAHURI, DADANG MASHUR, MAYARNI**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau,  
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293, Telp/Fax (0761) 63277

**Abstract:** Pekanbaru is one city in Indonesia that have evolved so rapidly, especially in the economic field. Developments led the city witnessed a social change and urban development that is high enough. The impact of social changes that took place between the other is the high level of poverty. To overcome the problem of poverty is one of them with the development of social entrepreneurship is developing social entrepreneurs by way of changing behavior and understanding or awareness of those around him. Where has the transformative power of social entrepreneurs with new ideas to exploit and create opportunities in the face of big problems, who was tireless vision to successfully deploy an idea he had. This study aims to determine and analyze the picture of the factors that affect the application of social entrepreneurship in empowering the poor through programs UEK - SP in the city of Pekanbaru.

**Keywords:** *Social entrepreneurship, poverty and empowering*

Kemiskinan adalah persoalan mendasar yang menyentuh secara langsung terhadap kelangsungan dan martabat suatu bangsa yang merdeka. Kemiskinan bagaimanapun ia didefinisikan akan menampilkan sisi-sisi buruk yang menantikan suatu pemecahan. Dalam kurun waktu sepanjang kurang lebih sepuluh tahun terakhir ini, persoalan kemiskinan dan berbagai program yang diselenggarakan untuk mengatasi masalah kemiskinan menyita perhatian berbagai kalangan pemerhati masalah sosial.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Model kemiskinan yang umumnya terjadi di negara-negara yang belum atau sedang berkembang, terkait dengan kenyataan buruk tentang tingkat sosial ekonomi masyarakat yang meliputi

rendahnya tingkat pendidikan, kebodohan, keterbelakangan, ketidakberdayaan, keterbatasan akses fasilitas, baik sarana maupun prasarana, dan lain-lain yang mengakibatkan masyarakat tidak dapat berkembang maksimal atau setidaknya mencapai hidup sesuai standar. Orang-orang yang mengalami kemiskinan disebut masyarakat miskin.

Istilah "*masyarakat miskin*" sering diidentikkan dengan istilah lain seperti "*masyarakat golongan ekonomi lemah*", "*masyarakat tidak mampu*", "*masyarakat tertinggal*", dan lain sebagainya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, bagi perempuan maupun laki-laki.

Daerah perkotaan memunculkan isu kemiskinan yang semakin berkembang, dimana dari beberapa analisis peneliti kemiskinan di perkotaan seperti selalu ada dan mengiringi setiap derap langkah pembangunan perkotaan. Kelompok miskin ini biasanya berkumpul dan punya ikatan yang kuat untuk saling membantu satu dengan yang lain, dengan cara apapun dan biasanya mereka mampu menempati ruang yang sempit, berdesakan dan hidup dengan segala aturan yang mereka buat demi kelangsungan hidup mereka bersama kelompoknya. Kemiskinan bukan hanya karena ketidakmampuan si miskin untuk mengakses sumber-sumber ekonomi, melainkan adanya kapitalisme yang mendera mereka. Kapitalisme yang dimaksud adalah dibatasinya kesempatan mereka untuk bisa mengakses sumber-sumber ekonomi oleh adanya kebijakan-kebijakan yang tidak memihak kepada mereka. Kebijakan yang mementingkan industri dan mengabaikan kaum miskin.

Perkembangan kemiskinan yang diderita ini salah satunya karena struktur sosial masyarakat tersebut tidak mampu memanfaatkan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka (kemiskinan struktural). Kehidupan masyarakat miskin ini mencerminkan bahwa mereka akan tetap mempertahankan kondisi hidup seperti berdesak-desakan dalam lingkungan yang tidak bersih, rawan bencana, dianggap malas, dan berbagai icon yang melekat pada mereka, dan tidak akan berani mengambil resiko untuk bisa pindah ketempat lain tanpa ada jaminan kehidupan yang lebih baik. Belum lagi, tempat hidup yang baru akan menjajikan pekerjaan rumah baru bagi mereka, yaitu bagaimana mereka harus beradaptasi lagi dengan kelompok barunya dan bagaimana mereka bisa bertahan hidup dengan kondisi yang seperti itu.

Kelompok miskin ini sangat rentan terhadap berbagai persoalan kota dan sangat rentan terhadap setiap perubahan akibat kebijakan terutama kebijakan ekonomi. Hal lain yang tergambar adalah, partisipasi mereka sangat rendah, terutama dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan organisasi

yang ada. Hal ini berimplikasi pada sulitnya pihak pemerintah dalam menjalankan beberapa program pengentasan kemiskinan ataupun program-program lain yang diterapkan guna memperbaiki kondisi sosial ekonomi mereka.

Kemiskinan yang diderita, sekali lagi tidak hanya kemiskinan secara ekonomi, melainkan juga secara budaya, seperti kurangnya keterampilan, kelemahan moral, kecemasan, serta apatis. Sikap apatis tersebut diwujudkan dengan keengganan mengintegrasikan diri mereka kedalam lembaga-lembaga utama dalam masyarakat. Dalam level individu, struktur pribadinya lemah dikarenakan terjadi pengikisan rasa optimis dengan mengkonsepsikan diri mereka sebagai seseorang yang tidak berharga, tidak berdaya, dan rendah diri. Mereka hidup dalam garis batas kemiskinan.

Menyadari hal itu, mereka kemudian bergantung kepada struktur sosial yang telah terbentuk agar mereka terlindung dari jatuh miskin. Mereka mempunyai kekhawatiran yang mendalam apabila struktur sosial yang telah mapan dalam komunitas mereka mengalami perubahan yang berarti, perubahan tersebut dapat menimbulkan kemungkinan-kemungkinan terjadinya ketidakstabilan dalam struktur yang dapat mengakibatkan mereka jatuh miskin. Mereka sangat menjaga keteraturan dalam sistem dan tidak menginginkan adanya perubahan. Komunitas tersebut tidak bisa berkembang dan tetap statis, ataupun mungkin mengalami perkembangan yang cukup lambat.

Kota Pekanbaru merupakan salah kota di Indonesia yang mengalami perkembangan begitu pesat, terutama di bidang ekonomi. Perkembangan yang terjadi menggiring Kota Pekanbaru mengalami perubahan sosial dan pembangunan perkotaan yang cukup tinggi. Dampak perubahan sosial yang terjadi diantara lain adalah tingginya urbanisasi, pengangguran, kemiskinan, kerusakan lingkungan dan sebagainya. Salah perubahan sosial yang menjadi permasalahan yang sangat mendapatkan perhatian adalah masalah kemiskinan. Dari data yang diperoleh angka kemiskinan di Kota Pekanbaru hingga tahun 2010 masih cukup tinggi.

Tabel. 1  
Jumlah dan Persentase Penduduk dan Rumah Tangga Miskin Menurut Hasil Survei Pemetaan dan Pendataan Penduduk Miskin Kota Pekanbaru 2007

No	Kecamatan	Jumlah		Jumlah		Persentase	
		Penduduk	Rumah Tangga	Penduduk Miskin	Rumah Tangga Miskin	Penduduk Miskin	Rumah Tangga Miskin
1	Tampian	98.615	23.080	4.693	1.029	4,76	4,46
2	Payung Sekaki	70.047	14.861	5.117	1.107	7,31	7,45
3	Bukit Raya	84.219	16.558	5.608	1.270	6,66	7,67
4	Marpoyan Damai	126.152	30.123	8.946	1.951	7,09	6,48
5	Tenayan Raya	99.687	26.292	11.940	2.799	11,98	10,65
6	Lima Puluh	43.964	8.750	3.061	729	6,96	8,33
7	Sail	24.062	5.388	2.262	544	9,40	10,10
8	Pekanbaru Kota	30.017	5.540	3.281	660	10,93	11,91
9	Sukajadi	56.331	12.353	3.926	914	6,97	7,40
10	Senapelan	38.045	8.543	3.391	795	8,91	9,31
11	Rumbai	50.704	12.125	8.713	1.959	17,18	16,16
12	Rumbai Pesisir	65.739	14.188	7.621	1.854	11,59	13,07
<b>JUMLAH</b>		<b>787.582</b>	<b>177.801</b>	<b>68.559</b>	<b>15.611</b>	<b>8,70</b>	<b>8,78</b>

Sumber: Survei Pemetaan dan Pendataan Penduduk Miskin Kota Pekanbaru, 2010

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kota Pekanbaru masih relatif tinggi, bahkan apabila ditinjau dari setiap kecamatan maka Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Marpoyan Damai yang memiliki jumlah penduduk miskin dan rumah tangga miskin terbesar. Kondisi ini cukup memprihatinkan sekali, apabila melihat perkembangan Kota Pekanbaru yang begitu pesat. Oleh karenanya untuk mengatasi masalah kemiskinan di perkotaan tersebut salah satunya dengan pengembangan *social entrepreneurship* (sosial kewirausahaan) yaitu mengembangkan wirausahawan sosial dengan cara mengubah perilaku dan pemahaman atau kesadaran orang di sekitarnya. Dimana wirausahawan sosial memiliki daya transformatif dengan gagasan-gagasan

barunya dengan memanfaatkan dan menciptakan peluang dalam menghadapi masalah besar, yang tidak kenal lelah mewujudkan visinya sampai berhasil menyebarkan gagasan yang dimilikinya.

Dalam mencapai visinya, wirausahawan sosial memerlukan kreativitas dan obsesi, yang melihat masalah dan mencita-citakan penyelesaian baru, yang mengambil prakarsa, yang mengumpulkan semua sumberdaya dan membangun organisasi untuk melindungi dan memasarkan cita-cita tersebut, yang menyediakan energi dan perhatian yang terpusat secara berkelanjutan untuk mengatasi hambatan dan yang terus memperbaiki, memperkuat, dan memperluas cita-cita. Sebuah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang kewirausahaan sosial menyakini bahwa wirausaha

sosial menciptakan dan memimpin organisasi untuk menghasilkan laba ataupun tidak, yang ditujukan sebagai katalisator perubahan sosial dalam tataran sistem melalui gagasan baru, produk, jasa, metodologi, dan perubahan sikap.

Fenomena inilah yang banyak berkembang di Kota Pekanbaru, dimana Pemerintah Kota Pekanbaru telah banyak memberikan bantuan modal kepada masyarakat miskin namun masih sedikit masyarakat miskin yang bisa berkembang dan berdaya serta keluar dari kemiskinannya. Program yang menjadi prioritas utama di Kota Pekanbaru salah satunya adalah Program Usaha Ekonomi Kelurahan – Simpan Pinjam (UEK – SP). Dimana program ini memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk bisa berkembang dan berdaya serta keluar dari kemiskinannya melalui bantuan modal yang diberikan. Tentunya masyarakat miskin yang berhak menerima program ini, yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan. Implementasi program ini diberikan kepada pihak Kelurahan dan LPM setempat yang nantinya akan membentuk struktur pengelolaan program UEK – SP.

Namun permasalahan yang timbul tidak semua masyarakat miskin menerima program ini, dikarenakan banyak masyarakat miskin yang ada tidak memiliki usaha sebagai syarat untuk bisa menerima bantuan modal yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Kondisi inilah yang membuat masyarakat miskin banyak tidak bisa menerima program UEK – SP akibat tidak memiliki usaha. *Social entrepreneurship* merupakan salah satu jawaban untuk membuat masyarakat miskin memiliki usaha dan dikembangkan menjadi usaha individu serta berhak menerima program UEK – SP di Kota Pekanbaru.

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran dan apa faktor-faktor yang menghambat penerapan *social entrepreneurship* dalam memberdayakan masyarakat miskin melalui program UEK – SP di Kota Pekanbaru studi kasus Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Marpoyan Damai. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk

mengetahui dan menganalisis gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *social entrepreneurship* dalam memberdayakan masyarakat miskin melalui program UEK – SP di Kota Pekanbaru studi kasus Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Marpoyan Damai.

Pengembangan masyarakat menurut Dunham (dalam Adi, 2003) adalah berbagai upaya yang terorganisir yang dilakukan guna meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat, terutama melalui usaha yang kooperatif dan mengembangkan kemandirian dari masyarakat, tetapi hal tersebut dilakukan dengan bantuan teknis dari pemerintah ataupun lembaga-lembaga sukarela. Dunham menyatakan ada lima prinsip dasar dalam pengembangan masyarakat, yaitu:

1. Penekanan pada pentingnya kesatuan kehidupan masyarakat, dimana pengembangan masyarakat harus menyangkut seluruh aspek kehidupan, seperti aspek kesehatan, rekreasi, ataupun kesejahteraan dalam arti sempit saja.
2. Pengembangan masyarakat memerlukan keterlibatan layanan yang subprofessional selain layanan yang professional.
3. Kebutuhan akan adanya *community worker* yang serba bisa (*multipurpose*), dimana petugas harus mampu bekerja pada berbagai basis pekerjaan yang berbeda.
4. Pentingnya pemahaman akan pola budaya masyarakat lokal. Lebih jauh lagi, para petugas haruslah benar-benar tulus ingin mengembangkan masyarakat yang ada, bukan sekedar memperkenalkan ataupun membawa teknologi yang baru ke masyarakat sasaran.
5. Adanya prinsip kemandirian yang menjadi prinsip utama dalam pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat harus dilaksanakan bersama masyarakat dan bukan sekedar untuk masyarakat.

Salah satu tokoh utama yang sangat berpengaruh dalam pemikiran modal sosial, yaitu James Coleman (dalam Hasbullah, 2006), yang mendefinisikan konsep modal sosial sebagai varian entitas, terdiri dari beberapa struktur sosial

yang memfasilitasi tindakan dari para pelakunya apakah dalam bentuk personal atau korporasi dalam suatu struktur sosial. Pada intinya konsep modal sosial memberikan penekanan pada kebersamaan masyarakat yang berbeda entitas, membangun jaringan untuk mencapai tujuan bersama demi memperbaiki kualitas kehidupan dan senantiasa melakukan perubahan dan penyesuaian secara terus menerus.

Kata pemberdayaan mengandung makna adanya aktivitas/usaha untuk menjadikan sesuatu dari keadaan yang tidak berdaya, tidak bertenaga, tidak berkekuatan menjadi kondisi atau keadaan yang berdaya, bertenaga, atau kuat. Pemberdayaan lebih bersifat kontekstual sosiologis, artinya bagaimana manusia dapat mempertahankan hidup (*survival*), tidak hanya dari segi fisik seperti pada masa awal perkembangan manusia, tetapi lebih dari itu pemberdayaan menyangkut keterlibatan, akses dan kemampuan untuk mengaktualisasikan diri dalam hal, seperti pengetahuan (ilmu), ekonomi, politik, hukum dan berbagai segi kehidupan manusia.

Menurut Naning Mardianah dalam Paulus Wirutomo dkk (2003:129) pemberdayaan dimaknai sebagai mendapatkan kekuatan (*power*) dan mengaitkan dengan kemampuan golongan miskin untuk mendapatkan akses ke sumber-sumber daya yang menjadi dasar dari kekuasaan dalam suatu sistem maupun organisasi. Sedangkan menurut Priararka (1996:45-47) pemberdayaan sebagai sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam fikiran masyarakat tentang kemapanan, antisistem, antistruktur dan antideterminisme.

Selanjutnya untuk memahami makna mengenai konsep pemberdayaan, menurut Terry Wilson dapat digambarkan dalam tiga tahapan, yaitu:

1. Pada tingkat politik dan nasional, pemberdayaan secara berlahan melakat dalam bahasa sehari-hari sebagai *mechanism of self-help for people* (mekanisme bantuan diri bagi orang lain).
2. Pada tingkat organisasi, pemberdayaan mempunyai daya tarik untuk mencari gagasan dalam meningkatkan motivasi kerja yang

sudah usang, seperti *total quality, habitual improvement, performance management, self-directed team work, internal customers, competence management* dan sebagainya.

3. Pada tingkat individu, pemberdayaan mengarah kepada peningkatan ketrampilan, status, kepercayaan dan kemampuan diri dalam meningkatkan taraf hidupnya. (Nyoman Sumaryadi, 2005:97-98).

Menurut Gunawan Sumodiningrat (1997: 164) pemberdayaan masyarakat adalah kemampuan individu yang senyawa dan unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan serta membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan menurut Nyoman Sumaryadi (2005:94-96) ada lima prinsip dasar konsep pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1. Untuk mempertahankan eksistensinya, dimana pemberdayaan masyarakat memerlukan *break-even* dalam setiap kegiatan yang dikelola.
2. Pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan.
3. Dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, antara kegiatan pelatihan dan pembangunan fisik termasuk pengembangan usaha merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
4. Dalam mengimplementasikan konsep pemberdayaan masyarakat harus dapat memaksimalkan sumber daya (*resources*), khususnya dalam hal dana baik yang berasal dari pemerintah atau swasta maupun sumber-sumber lainnya.
5. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus lebih memfungsikan diri sebagai katalis yang menghubungkan antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro dan kepentingan masyarakat yang bersifat mikro.

Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya memiliki tujuan, sebagai berikut:

1. Membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin, marjinal dan kaum kecil

seperti: buruh tani, masyarakat miskin perkotaan, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kelompok wanita yang didiskriminasi dan sebagainya.

2. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Sedangkan sasaran program pemberdayaan masyarakat dalam mencapai kemandirian adalah:

1. Terbukanya kesadaran dan tumbuhnya keterlibatan masyarakat akar rumput dalam mengorganisir diri untuk kemajuan dan kemandirian bersama.
2. Diperbaikinya kondisi sekitar kehidupan kaum rentan, lemah, tak berdaya, miskin dengan kegiatan-kegiatan peningkatan pemahaman, peningkatan pendapatan dan usaha-usaha kecil di berbagai bidang ekonomi ke arah swadaya (Nyoman Sumaryadi, 2005:115).

Lebih jauh Sumodiningrat menyatakan bahwa kebudayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan (*survive*) dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri demi mencapai tujuan. Ada tiga jenis dalam upaya pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang (baik laki-laki atau perempuan). Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi (*daya*) yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai masukan serta pembukaan akses kepada berbagai peluang

yang akan membuat masyarakat menjadi semakin dalam berdaya memanfaatkan peluang.

3. Memberdayakan mengandung arti melindungi. Strategi pengembangan harus berpusat pada upaya mendorong percepatan perubahan struktur ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional. Perubahan struktur ini meliputi proses perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi tangguh (Gunawan Sumodiningrat, 1997:157).

Ada beberapa indikator dalam pemberdayaan masyarakat, dimana Wilson dalam Nyoman Sumaryadi (2005:123-128) membuat penilaian suatu organisasi yang melakukan pemberdayaan masyarakat. Indikator-indikator tersebut adalah:

1. Reputasi, berhubungan dengan derajat penilaian organisasi yang akan melakukan pemberdayaan, karena dengan reputasi yang baik akan mudah melakukan pemberdayaan.
2. Fokus manajemen, mengacu pada cara menilai, mendorong, mendukung dan mempraktekkan pemberdayaan. Karena dalam melakukan pemberdayaan harus memperoleh dukungan dari kedua belah pihak, yaitu pemberdaya dan yang diberdayakan.
3. Manajemen pemberdayaan, mengacu kepada pemahaman dan pengelolaan pemberdayaan oleh pemerintah, swasta atau pihak yang akan memberdayakan. Sebab didalam melakukan pemberdayaan sangat dibutuhkan pemahaman penuh untuk dapat mengelola pemberdayaan dengan se-efektif dan se-efisien mungkin.
4. Atmosfir, hal ini mengarah kepada munculnya suasana/atmosfir pemberdayaan dalam suatu areal atau lokasi. Munculnya suasana ini akan membangkitkan minat, kekuatan dan komitmen masyarakat untuk dapat diberdayakan.
5. Kepemimpinan, tingkat gaya kepemimpinan yang diterapkan akan dapat mendorong dan mendukung proses pemberdayaan. Karena gaya kepemimpinan yang tidak sesuai akan kurang mendorong dan mendukung pemberdayaan yang dilakukan didalam masyarakat.
6. Mengeluarkan kesanggupan manusia.

- Melepaskan talenta, kemampuan dan ke-trampilan seseorang dalam melakukan pemberdayaan yang perlu sekali. Karena dengan mengeluarkan seluruh kemampuan yang dimiliki, diharapkan output yang diperoleh dari pemberdayaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
7. Pengakuan dan penghargaan. Hal ini mengarah kepada sebuah proses pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat perlu didukung dan dihargai. Di sisi lain pemberdayaan masyarakat yang berhasil juga memerlukan penghargaan dan pengakuan, baik secara formal atau informal.
  8. Inovasi, konsep pemberdayaan muncul juga akibat inovasi yang difikirkan oleh para ahli untuk mencari solusi terhadap masalah di dalam masyarakat. Selain itu juga pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu menghasilkan inovasi-inovasi baru dari para masyarakat di setiap level untuk dapat berdaya.
  9. Kepercayaan. Tingkat kepercayaan dan keterbukaan dalam melakukan pemberdayaan juga akan menjadi suplemen bagi orang untuk dapat berdaya. Karena tingkat kepercayaan yang tinggi akan mengurangi kegagalan dalam proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan.
  10. Team work, adalah tingkat pemanfaatan kemampuan/talenta yang dimiliki tim dalam melakukan pemberdayaan. Karena solitnya kerja tim akan semakin memperluas kesempatan untuk merealisasikan tujuan pemberdayaan.
  11. Pengambilan dan pengendalian keputusan. Tingkat pengambilan dan pengendalian keputusan yang dimungkinkan masyarakat untuk dapat turut serta, sehingga masyarakat yang diberdayakan dapat menikmati proses pemberdayaan.
  12. Komunikasi. Adanya tingkat komunikasi yang teratur dan terbuka akan memudahkan proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan. Karena dengan adanya komunikasi masyarakat akan lebih mudah memperoleh penjelasan dan penerangan ringkas dari tujuan pemberdayaan yang dilakukan.
  13. Kepuasan masyarakat. Derajat inisiatif pemberdayaan diarahkan kepada kepuasan masyarakat, secara internal dan eksternal. Kondisi ini diakibatkan oleh selama ini masyarakat jarang memperoleh pelayanan yang memuaskan dari pemerintah.
  14. Struktur dan prosedur. Melakukan perubahan dan kemudahan prosedur dalam melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat, sehingga organisasi pemberdaya dan masyarakat yang diberdayakan tidak menemukan kesulitan dalam prosedur pemberdayaan.
  15. Tujuan. Dalam melakukan pemberdayaan pasti memiliki tujuan, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat. Karena pemberdayaan masyarakat mempunyai kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan sosial ekonomi masyarakat.
- Selanjutnya dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat tidak terlepas dari permasalahan atau faktor penghambat. Ada beberapa faktor penghambat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat menurut Lowe, yaitu:
1. Ketakutan (*fear*)  
Banyak individu yang begitu sederhana takut akan pemberdayaan, hal ini diperlihatkan oleh: *Pertama*, individu pada level menengah dan junior takut akan hukuman jikalau membuat kesalahan. Dimana merupakan peninggalan dari gaya manajemen komando yang lebih menekankan kebebasan untuk mengambil resiko. *Kedua*, individu juga takut bahwa mereka tidak akan dapat dukungan yang dijanjikan apabila mereka melakukan kesalahan. *Ketiga*, individu juga memiliki ketakutan akan gagal. *Keempat*, individu juga takut akan kehilangan pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya.
  2. *Role of clarity*  
Bagi masyarakat, ketidaknyamanan pekerjaan baru berasal dari kebingungan atau kurang senang dengan peran baru atau pekerjaan baru mereka setelah diberdayakan. Hal ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, pihak pemberdaya merasa dilangkahi oleh suatu kebijakan tentang pemberdayaan masyarakat

yang menyerahkan kekuasaan dan wewenang atau membebaskan sesuatu kepada masyarakat. *Kedua*, pihak pemberdaya kurang memahami dan mengenal apa yang diinginkan oleh masyarakat. *Ketiga*, pihak pemberdaya tidak mempunyai kekuatan dan merasa kalah dari masyarakat yang diberdayakan. *Keempat*, para masyarakat sulit menyesuaikan diri kepada pekerjaan yang baru, seperti yang selama ini pedagang tiba-tiba harus menjadi petani. *Kelima*, pihak pemberdaya kurang jelas akan tujuannya melakukan pemberdayaan kepada masyarakat.

### 3. *Resistance to change*

Hal ini mengarah kepada kecenderungan oleh pihak pemberdaya (pemerintah, swasta atau pihak lainnya) untuk berpegang teguh kepada cara-cara yang sudah mapan dalam mengerjakan dan pengenalan proses pemberdayaan. Misalnya secara historis sistem yang digunakan disuatu tempat berhasil digunakan, tentunya akan tetap dicoba melaksanakan pada lingkungan yang berbeda (Nyoman Sumaryadi, 2005:159-160)

Kemudian untuk melihat lebih lanjut upaya pemberdayaan masyarakat, baik yang dilakukan pemerintah atau swasta harus dipandang sebagai pemacu untuk menggerakkan kegiatan ekonomi rakyat. Dimana berbagai upaya itu menurut Sunyoto Usman (2004:21) paling tidak harus memuat lima hal pokok, yaitu:

- Bantuan dana sebagai modal usaha.
- Pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan kegiatan sosial ekonomi rakyat.
- Penyediaan sarana untuk memperlancar pemasaran hasil produksi barang dan jasa masyarakat.
- Pelatihan bagi sosial ekonomi masyarakat.
- Penguatan kelembagaan kepada masyarakat.

Upaya yang telah dilakukan pemerintah sehubungan dengan permasalahan kemiskinan telah direalisasikan dalam bentuk Program IDT (Inpres Desa Tertinggal), KIK, KUD, Supra Insus, Kupedes, PKT dan sebagainya. Sehubungan dengan itu, dalam melakukan aksi pemberdayaan keberhasilannya sangat ditentukan

oleh proses yang dijalankan serta mekanisme pelaksanaannya dalam arti bahwa ibarat seorang yang membutuhkan sesuatu jangan diberi ikan, tetapi berilah kail. Pepatah ini mengandung makna bahwa dalam pemberdayaan masyarakat miskin libatkanlah masyarakat tersebut dalam proses, jangan melibatkan masyarakat setelah proses berjalan, dan masyarakat tinggal menikmati saja.

Untuk itu salah satu langkah strategis dalam melakukan pemberdayaan masyarakat adalah dengan membangun ekonomi lokal masyarakat, sehingga masyarakat nantinya dapat berdaya dengan kekuatan perekonomian yang ada di daerahnya. Dimana pengembangan ekonomi lokal adalah suatu pendekatan untuk mendorong aktivitas ekonomi melalui pembentukan kemitraan antara masyarakat – swasta – pemerintah dan memfokuskan pada pembangunan aktivitas klaster ekonomi, sehingga terbangun keterkaitan (*lingkages*) antara pelaku-pelaku ekonomi dalam satu wilayah. Sebab pembangunan ekonomi lokal mengarah kepada : *Pertama*, usaha untuk penguatan daya saing ekonomi lokal untuk pengembangan ekonomi daerah, *Kedua*, proses dimana pemerintah lokal dan organisasi berbasis masyarakat terlibat dalam mendorong, merangsang atau memelihara aktivitas usaha dan atau penciptaan lapangan kerja. *Ketiga*, sebagai solusi dalam pemulihan dan pengembangan perekonomian nasional, terutama dalam pendayagunaan potensi ekonomi di masing-masing daerah dengan berbasis pada sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakatnya masing-masing (Antonius Tarigan, 2005:177).

Membangun ekonomi lokal masyarakat merupakan usaha untuk membangkitkan perekonomian lokalnya. Karena dengan adanya pengembangan ini masyarakat akan terbantu dalam pengalokasian produk yang dihasilkan untuk segera didistribusikan. Sebab peran pemerintah dan swasta dalam proses pengembangan ekonomi lokal adalah membangun kemitraan dengan masyarakat dalam menampung hasil produknya. Pihak pemerintah berperan sebagai pembina masyarakat dalam mengelola hasil



produk yang sudah lama digeluti oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Sedangkan swasta berperan sebagai mitra yang menampung hasil produk masyarakat untuk dapat didistribusikan di pasar.

## METODE

Untuk pengumpulan data primer maupun data sekunder menggunakan metode kuantitatif melalui penyebaran kuisioner, setelah data tersebut terkumpul, data tersebut dikelompokkan dan ditabulasikan menurut jenis dan macam data. Hal ini digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan (*explanatory*) tentang fenomena yang berhubungan dengan penerapan *social entrepreneurship* dalam memberdayakan masyarakat miskin perkotaan di Kota Pekanbaru. Adapun yang menjadi alasan pemilihan metode kuantitatif adalah keinginan untuk menganalisis serta mengenal masalah dan mendapat pembenaran terhadap keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung, melakukan verifikasi untuk kemudian didapat hasil guna pembuatan rencana pada masa yang akan datang. Melalui kuisioner diharapkan hasil penelitian dapat mengungkapkan bagaimana penerapan *social entrepreneurship* dalam memberdayakan masyarakat miskin perkotaan di Kota Pekanbaru.

Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi sebagai sumber informasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian tentang penerapan *social entrepreneurship* dalam memberdayakan masyarakat miskin perkotaan di Kota Pekanbaru. Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat penerima kebijakan dan pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, teknik pengambilan sampel menggunakan *sampling acak (simple random sampling)* untuk menemukan sumber informasi yang paling tepat dalam memberikan tanggapan tentang penerapan *social entrepreneurship* dalam memberdayakan masyarakat miskin perkotaan di Kota Pekanbaru.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian analisis kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggunakan cara

memaparkan hasil informasi yang didapat melalui wawancara dan pengamatan lapangan, kemudian dianalisa dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif diharapkan peneliti dapat menyajikan gambaran maupun hasil analisa yang tidak hanya berbentuk angka-angka, melainkan gambaran yang lebih mendalam sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan.

## HASIL

Kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) meyakini bahwa wirausaha sosial menciptakan dan memimpin organisasi untuk menghasilkan laba ataupun tidak, yang ditujukan sebagai katalisator perubahan sosial dalam tataran sistem melalui gagasan baru, produk, jasa, metodologi, dan perubahan sikap. Sedangkan menurut Martin dan Osberg (2007), *social entrepreneurship* memiliki tiga komponen sebagai berikut:

- *Identifying a stable but inherentlu unjust equilibrium that causes the exclusion, marginalization, or suffering of a segmen of humanity that lacks the financial means or political clout to achieve any transformative benefit on its own.* (Mengidentifikasi keseimbangan yang stabil tetapi menyebabkan pengecualian didalamnya, marjinalisasi, atau penderitaan segmentasi kemanusiaan yang tidak memiliki sarana keuangan atau kekuatan politik untuk mencapai manfaat transformative itu sendiri).
- *Identifying an opportunity in this unjust equilibrium, developing a sosial value proposition, and bringing to bear challenging the stable state's hegemony.* (Mengidentifikasi peluang dalam keseimbangan yang salah, mengembangkan proposisi nilai sosial, dan membawa tanggungan untuk menantang hegemoni Negara yang stabil).
- *Forging a new, stable equilibrium that releases trapped potential or alleviates the suffering of the targeted group, ant thought imitation and creation of a stable ecosystem around the new equilibrium*

*ensuring a better future for the targeted group and even society at large* (Membangun hal yang baru, keseimbangan stabil yang melepaskan terjebak potensial atau meredakan penderitaan kelompok sasaran, meniru pemikiran dan penciptaan ekosistem yang stabil disekitar keseimbangan baru memastikan masa depan yang lebih baik untuk kelompok sasaran dan bahkan masyarakat secara keseluruhan).

Untuk mengetahui hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan yang telah ditetapkan pada tiga lokasi, yaitu UEK – SP Kecamatan Rumbai, UEK – SP Kecamatan Tenayan Raya dan UEK – SP Kecamatan Marpoyan damai dalam rangka penerapan *social entrepreneurship* dalam memberdayakan masyarakat miskin melalui program UEK – SP di Kota Pekanbaru, dapat dideskripsikan sebagai berikut:

### **1. Penerapan *Social Entrepreneurship* dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Melalui Program UEK – SP di Kota Pekanbaru**

Wawancara yang dilakukan terhadap informan yang diteliti tentang penerapan *social entrepreneurship* ada pada program UEK – SP yang dilaksanakan oleh pengelola, hasilnya adalah Program UEK – SP yang dilaksanakan orientasinya bukanlah laba semata-mata, tetapi sebagai alat untuk membantu mengembangkan usaha dari masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu juga untuk menjadikan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Namun laba juga tetap menjadi alat untuk memotivasi peminjam program UEK – SP untuk bisa berkembang dan mengembalikan dana pinjaman yang dilakukannya.

Dari hasil wawancara ini menjelaskan bahwa program UEK – SP yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, tidak menjadikan laba sebagai tujuan utamanya. Tetapi setiap usaha yang diberikan bantuan modal oleh pengelola UEK – SP harus terus berkembang, agar bisa mengembalikan dana pinjaman modal usaha yang telah diperoleh. Sebab dampak pengembalian pinjaman yang dilakukan oleh peminjam akan

memberikan kesempatan bagi masyarakat yang lain untuk menerima bantuan modal melalui program UEK – SP yang dilaksanakan. Oleh karena itu setiap usaha yang disahkan atau telah diverifikasi harus mengarahkan kepada usaha yang potensial, sehingga bisa berkembang dan tumbuh serta mampu mengembalikan dana pinjaman yang diperoleh.

Kemudian wawancara yang dilakukan tentang penerapan *social entrepreneurship* bisa diberikan dan memberdayakan masyarakat miskin, hasilnya menyebutkan penerapan *social entrepreneurship* sebenarnya bisa dilakukan melalui program UEK – SP yang ada. Karena program UEK – SP yang diberikan memang diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Namun syaratnya masyarakat miskin tersebut harus memiliki usaha yang bisa dijadikan kriteria penerima program UEK – SP.

Dari hasil wawancara ini menjelaskan bahwa penerapan *social entrepreneurship* bisa dilakukan melalui program UEK – SP yang pada umumnya berasal dari masyarakat miskin. Tetapi masyarakat miskin yang bisa memperoleh program UEK – SP adalah masyarakat miskin yang memiliki usaha di bidang yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah. Artinya setiap masyarakat miskin yang ingin memperoleh program UEK – SP harus memiliki usaha terlebih dahulu baru bisa menerima program tersebut.

Persyaratan inilah yang menjadi rentan terjadinya penyelewengan penggunaan dana UEK – SP yang dimiliki oleh masing-masing pengelola. Sebab masyarakat miskin yang ada masih cenderung sedikit yang memiliki usaha, karena untuk memenuhi kebutuhan hidup saja susah apalagi harus mempunyai usaha. Maka dari verifikasi data para pemohon yang sudah masuk hendaknya dilakukan secara selektif, sehingga yang memperoleh program UEK – SP benar-benar masyarakat miskin yang memiliki usaha dan usahanya juga sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh pihak pengelola.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan tentang kendala-kendala masyarakat miskin dalam menjalankan program UEK – SP yang mengembangkan *entrepreneuership*. Disebutkan

bahwa kendala yang dijumpai masyarakat miskin dalam melaksanakan program UEK – SP yang mengarah kepada pengembangan *entrepreneurship* diantaranya adalah mental yang dimiliki penerima program yang masih kurang baik, artinya masyarakat miskin selalu berfikir instan untuk memperoleh keberhasilan tanpa memperhatikan lingkungan usaha yang dikembangkan sehingga banyak usaha yang dikerjakan menemui kegagalan. Selain itu juga ketidakmampuan masyarakat miskin dalam memilih usaha yang akan dikelola juga menjadi hambatan dalam mengembangkan *entrepreneurship*. Sebab jika usaha yang dibangun merupakan usaha kebanyakan orang atau yang bermodal besar tentunya akan menyulitkan masyarakat miskin untuk bisa bertahan dalam persaingan.

Kendala utama masyarakat miskin dalam mengembangkan program UEK – SP ke arah *entrepreneurship* adalah: *Pertama*, ketidaksiapan mental masyarakat miskin untuk menerima program UEK – SP yang mengembangkan usaha yang dimilikinya. Ketidakmampuan ini tentunya mengarah kepada ketidaksiapan masyarakat miskin dalam manajemen usaha yang dimilikinya, sehingga usaha yang dikerjakannya bisa tidak berkembang. Apabila sudah seperti ini maka usaha yang dikerjakan oleh masyarakat miskin bisa saja bangkrut dan berimbas kepada ketidakmampuan mengembalikan dana pinjaman yang sudah diberikan.

*Kedua*, ketidakmampuan masyarakat miskin memilih usaha apa yang akan dikembangkan juga bisa menjadi kendala dalam melaksanakan program UEK – SP. Karena menentukan usaha yang akan dikembangkan juga menjadi langkah strategis untuk bisa bersaing dalam menjalankan usaha. Bahkan sebaiknya memilih usaha yang akan dikembangkan harus berdasarkan pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman yang dimiliki oleh masyarakat miskin tersebut. Sehingga nantinya usaha yang dikembangkan dapat tumbuh dan memberikan keuntungan, serta bisa mengembalikan modal pinjaman yang telah diperoleh.

Setelah itu wawancara yang dilakukan tentang kebutuhan *sosial entrepreneurship*

dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Terungkap bahwa penerapan *social entrepreneurship* dalam memberdayakan masyarakat miskin sebenarnya sangat dibutuhkan, karena melalui pola ini setiap masyarakat miskin akan merasa saling memiliki rasa kebersamaan dalam mengembangkan usaha yang mereka geluti. Bukan malah menjadi pesaing antara satu masyarakat miskin dengan masyarakat miskin lainnya.

Secara tidak langsung ini menjelaskan bahwa penerapan *social entrepreneurship* sangat dibutuhkan dalam mengembangkan program UEK – SP, karena pola *social entrepreneurship* mengarahkan kepada pengembangan usaha secara bersama-sama diantara usaha sejenis yang dikembangkan oleh masyarakat miskin. Artinya setiap masyarakat miskin penerima program UEK – SP seharusnya saling membantu dalam memecahkan permasalahan dalam mengembangkan usaha yang digelutinya masing-masing, bukan menjadi pesaing untuk menghancurkan usaha masyarakat miskin lainnya.

Walaupun jenis usaha yang dikembangkan masyarakat miskin berbeda, tetapi mereka bisa berbagi pengetahuan, ketrampilan, pengalaman dan informasi. Sehingga usaha yang dikembangkan nantinya dapat terus tumbuh untuk menjadi usaha yang mandiri. Motivasi ini perlu dibangun didalam diri masyarakat miskin disaat menerima program UEK – SP, sehingga masyarakat memiliki semangat yang tinggi untuk bisa mengembangkan usaha yang sudah dipilihnya. Sehingga mampu merubah persepsi masyarakat yang ingin memperoleh keberhasilan usaha dengan instan. Selain itu juga pola konsumtif masyarakat harus dikurangi pada saat menerima bantuan modal usaha, agar dana bantuan modal dapat terfokus digunakan dalam mengembangkan usaha yang sudah dipilih oleh masyarakat miskin.

Berdasarkan hasil keseluruhan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan *social entrepreneurship* dalam memberdayakan masyarakat miskin perkotaan melalui program UEK – SP disimpulkan masih berjalan dengan kurang baik. Artinya program UEK – SP yang seharusnya bisa dijadikan landasan dalam

penerapan *social entrepreneurship* belum berjalan dengan lancar. Karena masyarakat kurang memahami pola bantuan modal yang diberikan dengan mengembangkan usaha yang dimilikinya. Akibatnya masyarakat berjalan masing-masing atau individual dalam mengembangkan usaha yang digelutinya atau bahkan lebih cenderung menggunakan bantuan modal yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya daripada mengembangkan usaha. Kendala inilah yang akhirnya kurang bisa mengembangkan usaha yang dikelola oleh masyarakat miskin, karena lebih mementingkan kebutuhan konsumtifnya daripada mengembangkan usaha yang dikelolanya.

## **2. Faktor-Faktor yang Menghambat Penerapan *Social Entrepreneurship* dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Melalui Program UEK – SP di Kota Pekanbaru**

Wawancara yang dilakukan terhadap informan yang diteliti tentang faktor-faktor yang menghambat penerapan *social entrepreneurship* melalui program UEK – SP kepada masyarakat miskin di Kota Pekanbaru diantaranya adalah mentalitas dan budaya masyarakat, pola pikir masyarakat, *skill*, persaingan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *social entrepreneurship* melalui program UEK – SP kepada masyarakat miskin di Kota Pekanbaru adalah:

### · Mentalitas dan budaya

Masyarakat miskin di Kota Pekanbaru memiliki mentalitas yang rendah untuk keluar dari jaringan kemiskinan yang membelenggunya, sehingga kurang memiliki kemauan yang kuat di dalam diri mereka untuk bisa keluar dari kemiskinan. Mentalitas yang tidak baik akan memberikan dampak negatif dalam pengelolaan modal usaha yang diperoleh dari program UEK – SP, sebab masyarakat miskin akan merasa kebingungan begitu sudah menerima bantuan modal usaha. Apakah bantuan modal tersebut digunakan untuk mengembangkan usaha seperti

yang diinginkan program UEK – SP atau lebih memenuhi kebutuhan hidup yang selama ini memang masih kekurangan. Mental seperti inilah yang bisa membuat bantuan modal yang diberikan tidak bisa mengembangkan usaha yang dikelolanya, ditambahkan lagi munculnya ketakutan (*fear*) dalam diri masyarakat miskin dalam menggunakan bantuan modal yang diberikan juga disebabkan faktor mental.

Selain itu, faktor budaya masyarakat miskin sudah sangat kental, artinya mereka tidak begitu mempedulikan apakah program yang diberikan bisa dilaksanakan atau tidak bukan menjadi beban bagi masyarakat miskin. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak sepenuh hati yang terkadang bisa menyebabkan kegagalan program. Bahkan budaya yang berkembang didalam masyarakat miskin dengan istilah “*ya kalau sudah miskin mau apa lagi*”, kondisi ini membuat masyarakat miskin merasa tidak terbebani apabila sudah menerima program yang dilaksanakan.

### · Pola pikir

Pada dasarnya masyarakat miskin di Kota Pekanbaru masih memiliki pola pikir bahwa program bantuan yang diberikan pemerintah itu adalah hibah. Artinya masyarakat menerima bantuan modal melalui program UEK – SP dianggap sebagai pemberian dari pemerintah, sehingga sangat tidak terbebani untuk mengembalikan bantuan modal yang sudah diterimanya.

Kondisi ini yang membuat akhirnya masyarakat berpola konsumtif, yang berfikir untuk lebih memenuhi kebutuhan hidupnya daripada mengembangkan usaha yang merupakan peruntukkan bantuan modal yang diterima. Ditambah lagi pihak pemerintah juga masih kurang memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat miskin yang berpola pikir seperti ini atau tidak bisa mengembalikan bantuan modal yang diberikan. Dampaknya masyarakat miskin akan menjadi manja dan santai saja apabila tidak bisa mengembalikan bantuan modal yang sudah diterimanya.

· *Skill*

Pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki juga menjadi faktor penentu didalam melakukan penerapan *social entrepreneurship* dengan menggunakan dana bantuan program UEK – SP. Karena apabila masyarakat miskin tidak memiliki *skill* dalam mengembangkan usaha yang dikelolanya, sangat tidak mungkin usaha itu bisa berkembang dan maju. Sebab filosofinya usaha yang akan berkembang apabila pengelolanya faham dan mengerti bagaimana mengelola usaha yang dimilikinya. Maka dari itu proses verifikasi yang dilakukan oleh pengelola UEK – SP mengarahkan kepada masyarakat miskin untuk mengembangkan usaha atau mengerjakan usaha yang memang mereka tekuni, bukan hanya sekedar buka usaha untuk memperoleh bantuan modal melalui program UEK – SP.

· Persaingan

Kejelian analisa pasar dan studi kelayakan perlu ditingkatkan bagi masyarakat miskin penerima UEK – SP. Karena ketidakmampuan masyarakat menganalisa usaha yang akan dikembangkannya, tentu akan menyebabkan usaha itu menemui persaingan dari usaha orang lain yang memiliki kekuatan modal lebih baik. Selain itu juga menentukan usaha yang akan dikerjakan juga bukan karena ikut-ikutan atau usaha yang sedang *tren*. Sebab tingkat persaingan usaha yang tinggi akan menggilas usaha-usaha masyarakat miskin yang modalnya kecil. Oleh karenanya penentuan usaha yang dilakukan harus juga memperhatikan persaingan yang dimiliki dari usaha yang akan digeluti.

· Kehidupan sosial ekonomi

Kehidupan sosial ekonomi juga bisa memberikan hambatan bagi masyarakat miskin untuk bisa mengembangkan usahanya melalui bantuan modal UEK – SP. Karena dengan tingkat intensitas yang terlalu tinggi dalam kehidupan berrumah tangga akan memberikan pengaruh kepada masyarakat miskin untuk lebih maksimal dalam mengembangkan usaha yang dikelolanya. Selain itu juga tingkat pendapatan yang rendah

didalam keluarga, juga bisa memecahkan konsentrasi masyarakat miskin untuk lebih mengembangkan usaha atau memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Fakta inilah yang terkadang sulit untuk dihindari oleh masyarakat miskin dalam mengembangkan usaha yang mereka geluti.

Berdasarkan fakta faktor yang menghambat penerapan *social entrepreneurship* dalam memberdayakan masyarakat miskin Kota Pekanbaru telah jelas bahwa penerapan *social entrepreneurship* melalui program UEK – SP belum mampu secara signifikan merubah kehidupan perekonomian masyarakat miskin. Sebab masyarakat masih banyak yang memiliki mental, budaya, pola fikir, *skill* dan kehidupan sosial ekonomi yang belum tertata dengan baik. Kondisi ini tentunya membutuhkan perbaikan kedepannya, agar penerapan *social entrepreneurship* melalui program UEK – SP bisa benar-benar mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan.

## SIMPULAN

Penerapan *social entrepreneurship* pada masyarakat miskin melalui program UEK-SP disimpulkan masih berjalan dengan kurang baik. Artinya program UEK – SP yang seharusnya bisa dijadikan landasan dalam penerapan *social entrepreneurship* belum berjalan dengan lancar. Karena masyarakat kurang memahami pola bantuan modal yang diberikan dengan mengembangkan usaha yang dimilikinya.

Akibatnya masyarakat berjalan masing-masing atau individual dalam mengembangkan usaha yang digelutinya atau bahkan lebih cenderung menggunakan bantuan modal yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya daripada mengembangkan usaha. Kendala inilah yang akhirnya kurang bisa mengembangkan usaha yang dikelola oleh masyarakat miskin, karena lebih mementingkan kebutuhan konsumtifnya daripada mengembangkan usaha yang dikelolanya..

Faktor-faktor yang menghambat penerapan *social entrepreneurship* dalam memberdayakan masyarakat miskin Kota Pekanbaru telah jelas bahwa penerapan *social entrepreneurship*

melalui program UEK – SP adalah mentalitas dan budaya masyarakat, pola pikir masyarakat, *skill*, persaingan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andi, Isbandi, 2003, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*, Edisi Revisi., Lembaga Penerbit FE UI, Depok.
- Antonius Tarigan, 2005, *Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21*, URDI, Yayasan Sugijanto Soegijoko, Jakarta.
- Arikunto Suharsimi, 2001, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bornstein David, 2006, *Mengubah Dunia: Kewirausahaan Sosial dan Kekuatan Gagasan Baru*, Penerjemah Marco Kusumawijaya, Editor Bambang Agung, Insist Press – Nurani Dunia, Yogyakarta.
- Briha Mikkelsen, 1999, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Gunawan Sumodiningrat, 1997, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, Bina Rena Parawira, Jakarta.
- Hasbullah Jousairi, 2006, *Social Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)*, MR United Press, Jakarta.
- Hugh Evans dan Risfan Munir, 2005, *Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21*, Yayasan Sugijanto Soegijoko, Jakarta.
- Husein Umar, 1999, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lawang Robert, 2005, *Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologi*, Depok Fisip UI Press, Jakarta.
- Paulus Wirutomo dkk, 2003, *Paradigma Pembangunan di Era Otonomi Daerah*, Penerbit Cipruy, Jakarta.
- Prianarkadan Onny S. Priyono, 1996, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta.
- Sumaryadi Nyoman, 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, Penerbit Citra Utama, Jakarta.
- Winarno, 2008., *Membangun Kewirausahaan Sosial: Meruntuhkan dan Menciptakan Sistem Secara Kreatif*, <http://www.schwabfound.org>.